

LAPORAN TAHUNAN 2025



PT BPR Artha Moro
berijin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, laporan tahunan PT BPR Artha Moro ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang kinerja dan pencapaian yang telah diraih oleh PT BPR Artha Moro sepanjang tahun 2025, serta sebagai bahan evaluasi bagi pengembangan yang lebih baik di masa mendatang.

Pada tahun 2025 PT BPR Artha Moro telah melalui berbagai tantangan dan peluang yang turut membentuk perjalanan perusahaan. Berbagai inovasi dan upaya peningkatan kualitas layanan, serta komitmen perusahaan dalam memberikan dukungan kepada sektor ekonomi lokal dan masyarakat, menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang perusahaan ambil. Dalam menjalani kegiatan perbankan, perusahaan selalu berusaha untuk tetap menjaga prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Laporan ini mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, operasional, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kami berharap laporan tahunan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, serta seluruh pihak yang terlibat dalam perkembangan PT BPR Artha Moro.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada PT BPR Artha Moro. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut, sehingga PT BPR Artha Moro dapat terus berkembang dan berkontribusi positif bagi perekonomian masyarakat.

DAFTAR ISI

A. INFORMASI UMUM	1
1. Kepengurusan	1
2. Kepemilikan	1
3. Perkembangan Usaha	2
4. Strategi dan Kebijakan Manajemen	4
5. Laporan Manajemen	4
B. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	6
1. Laporan Keuangan	6
2. Iktisar Kebijakan Akuntansi	10
3. Catatan Atas Laporan Keuangan	35
C. OPINI AKUNTAN PUBLIK	42
D. SURAT PERNYATAAN DIREKSI	44
E. LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA	45
1. Ringkasan Hasil Penilaian (<i>Self Assessment</i>) atas Penerapan Tata Kelola	45
2. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	45
3. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	46
4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	46
5. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR	46
6. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR	47
7. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	48
8. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	48
9. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun	49
10. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	49
11. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	50
12. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	50
13. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	50
14. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	51

A. INFORMASI UMUM

1. Kepengurusan

a. Dewan Komisaris

1) Sri Yatin, SE

Komisaris Utama

Lahir di Sragen pada tanggal 14 Februari 1966. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT BPR Artha Moro sejak tahun 2019.

2) Widodo, SH.MM

Komisaris

Lahir di Sragen pada tanggal 6 April 1969. Menjabat sebagai Komisaris PT BPR Artha Moro sejak tahun 2024.

b. Direksi

1) Henry Yulian, SE

Direktur Utama

Lahir di Jambi pada tanggal 3 Januari 1961. Menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Artha Moro sejak tahun 2023.

c. Pejabat Eksekutif

1) Andang Mulyono, Kepala Bagian Marketing

Lahir di Surakarta pada tanggal 10 Agustus 1973. Menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing PT BPR Artha Moro sejak tahun 2019.

2) Indah Hardini Budi Utami, Kepala Bagian Operasional

Lahir di Semarang pada tanggal 29 Maret 1986 Menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional PT BPR Artha Moro sejak tahun 2020.

3) Anggarina Rafika Yani M.S., Pejabat Eksekutif Sistem Pengendalian Intern

Lahir di Ngawi pada tanggal 31 Mei 1993. Menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Sistem Pengendalian Intern PT BPR Artha Moro sejak tahun 2024.

4) Reko Budianto, SE, Pejabat Eksekutif Literasi dan Inklusi

Lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1966. Menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Literasi dan Inklusi PT BPR Artha Moro sejak tahun 2024.

5) Henky Effendi, SE, Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU PPT

Lahir di Solo pada tanggal 30 Mei 1976. Menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU PPT PT BPR Artha Moro sejak tahun 2025.

2. Kepemilikan

PT BPR Artha Moro dimiliki oleh 2 (dua) orang Pemegang Saham dengan jumlah modal disetor sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari modal dasar sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Berikut daftar kepemilikan saham PT BPR Artha Moro pada tahun 2025:

No.	Nama	Kepemilikan		%
		(Lembar)	Nominal	
1	Sri Yatin, SE	39,650	3,965,000,000	99.13
2	Helen Yosita Gunawan	350	35,000,000	0.88
Jumlah		40,000	4,000,000,000	100.00

3. Perkembangan Usaha

a. Riwayat Singkat Pendirian BPR

Perusahaan didirikan pada tanggal 8 Juli 1996 dengan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Gemolong Artha Mulyo, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris Pujiastuti Pangestu, SH dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-8405.HT.01.01.TH'96 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gemolong Artha Mulyo.

Dalam perjalanannya terdapat beberapa kali perubahan akta perusahaan di antaranya pada tanggal 4 Juli 2013 melakukan perubahan nama dengan akta notaris yang dibuat oleh Lies Setyorini, SH.MH.MPd dan telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui Keputusan Bank Indonesia Nomor: 15/3/KEP.Ka.KpwBI/SLo/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Perubahan Nama PT Bank Perkreditan Rakyat Gemolong Artha Mulyo menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Moro.

Berikut data perusahaan PT BPR Artha Moro:

Nama Perusahaan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Moro
 Alamat : Jalan Veteran No. 7, Mageru, Sragen Tengah
 Sragen, Jawa Tengah
 Status Bank : Konvensional
 Badan Hukum : PT (Perseroan Terbatas)
 Ijin Prinsip : Menteri Keuangan nomor: S-1343/MK.17/1995
 Ijin Usaha : SK Menteri Keuangan nomor: Kep-084/KM.17/1997
 Tanggal beroperasi : 17 Juli 1997
 NPWP : 01.752.092.5-528.000

b. Visi dan Misi

Visi: Menjadi BPR yang tangguh dan terpercaya pilihan masyarakat.

Misi:

- 1) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat dan nasabah.
- 2) Ikut serta dalam peran aktif meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui jasa perbankan.
- 3) Menambah fasilitas dan produk-produk bisnis baru yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan masyarakat secara umum.

c. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Nama Rekening	Jumlah (Rp)
Pendapatan Operasional	2.396.185.610
Beban Operasional	2.076.807.476
Pendapatan Non Operasional	55.941.384
Beban Non Operasional	208.000
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	375.111.518
Taksiran Pajak Penghasilan	-
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	375.111.518

d. Rasio Keuangan

Jenis Rasio	Nilai Rasio (%)
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	91,90
Rasio Cadangan terhadap PPKA	100,00
<i>Non Performing Loan (NPL) Neto</i>	35,90
<i>Non Performing Loan (NPL) Gross</i>	44,21
<i>Return On Assets (ROA)</i>	2,05
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	86,67
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	9,70
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	137,62
<i>Cash Ratio</i>	39,33

e. Penjelasan Mengenai NPL

Penyebab utama kondisi NPL adalah debitur mengalami penurunan dalam penerimaan hasil usahanya ataupun kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga debitur mengalami kesulitan atau tidak dapat membayar angsuran kredit sesuai dengan yang seharusnya.

Langkah penyelesaian yang dilakukan BPR antara lain BPR telah melakukan restrukturisasi kredit terhadap beberapa debitur yang memenuhi syarat, meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit, meningkatkan kompetensi SDM bagian kredit, menambah karyawan sebagai Account Officer untuk meningkatkan penyaluran kredit, menambah karyawan bagian Remedial untuk mempercepat langkah penyelesaian kredit NPL, melakukan penjualan agunan di bawah tangan dengan persetujuan debitur

f. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

Perubahan penting pada tahun 2025 antara lain:

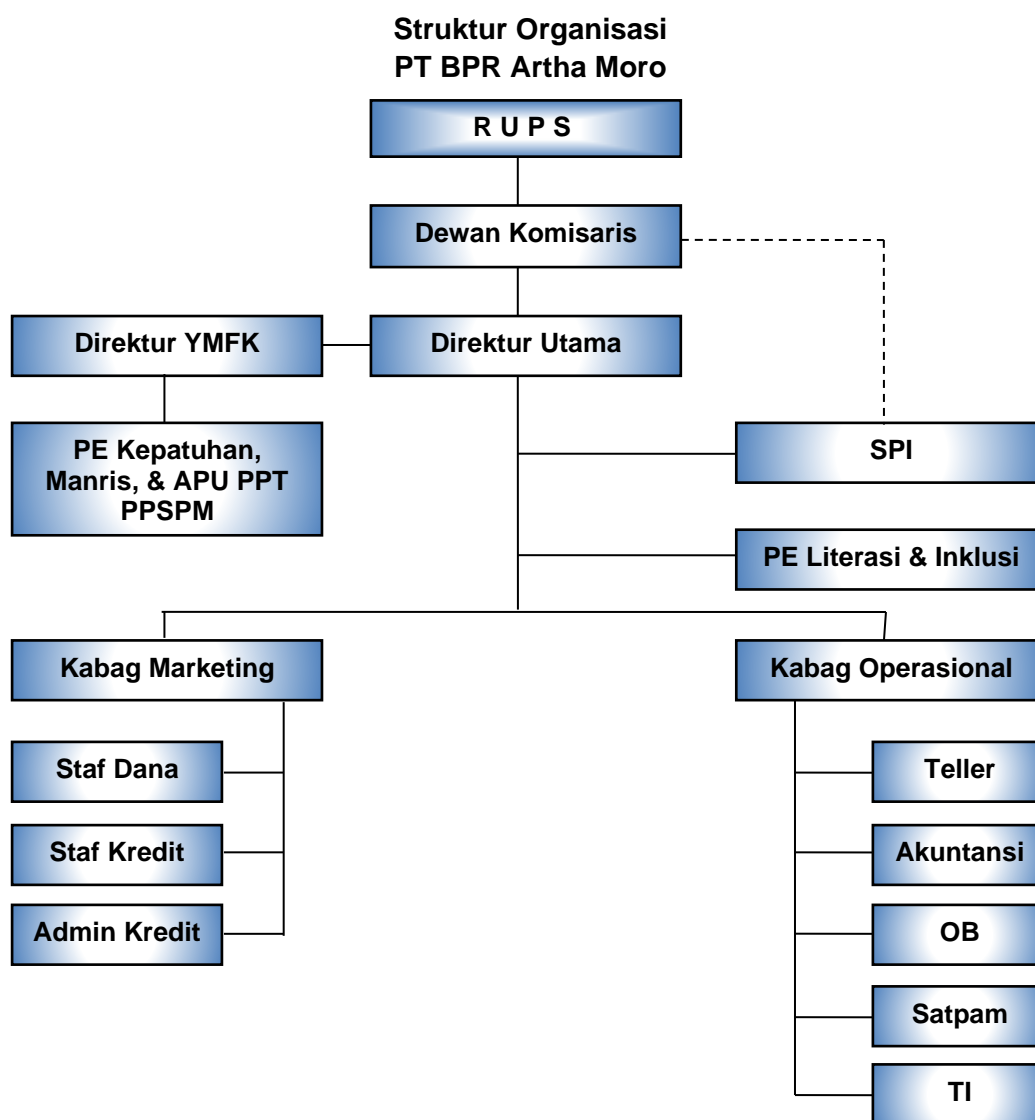
- ❖ BPR mengangkat 1 orang Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU PPT..
- ❖ BPR melakukan pemindahan alamat Kantor Kas Gemolong dengan gedung kantor yang lebih representatif dan lokasi yang lebih strategis.

4. Strategi dan Kebijakan Manajemen

Beberapa strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh BPR antara lain BPR menyalurkan kredit dengan lebih berhati-hati agar tidak menambah permasalahan pada NPL. BPR meningkatkan penyaluran kredit dengan menambah karyawan marketing kredit, promosi di pasar-pasar, pengembangan pelayanan kredit bagi karyawan perusahaan yang berada dalam kelompok usaha BPR dengan pembayaran angsuran melalui potong gaji, meningkatkan pelayanan kredit pada sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

5. Laporan Manajemen

a. Struktur Organisasi



b. Bidang Usaha

Bidang Usaha utama PT BPR Artha Moro adalah menghimpun dana dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam bentuk tabungan dan deposito, dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam bentuk kredit.

Produk simpanan BPR Artha Moro antara lain: Tabungan Artha, Tabungan Rakyat (TARA), Tabungan Hari Raya (TAHARA), Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL), dan Deposito.

Produk kredit BPR Artha Moro antara lain: Kredit Umum, Kredit Karyawan BPR, Kredit Karyawan Swasta.

c. Teknologi Informasi

PT BPR Artha Moro bekerjasama dengan PT Pintech Royal Mandiri sebagai Penyelenggara Jasa Teknologi Informasi (PJTI) dalam pengadaan *Core Banking System (CBS)*.

d. Perkembangan dan Target Pasar

Pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang signifikan dalam penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan, terutama untuk produk tabungan TAHARA dan TARA.

Untuk penyaluran kredit, BPR memperluas jangkauan dengan menjajaki potensi calon nasabah di pasar-pasar dan karyawan perusahaan swasta.

e. Jaringan Kantor

Jaringan kantor BPR Artha Moro terdiri dari 1 Kantor Pusat dan 1 Kantor Kas dengan alamat sebagai berikut:

1) Kantor Pusat

Alamat: Jalan Veteran No. 7, Mageru, Sragen Tengah, Sragen, Jawa Tengah.

2) Kantor Kas Gemolong

Alamat: Jalan Sancakan, Desa Ngeseng, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

B. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

1. Laporan Keuangan

PT. BPR ARTHA MORO
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2025 (Audited)	31 Des 2024 (Audited)
ASET LANCAR			
Kas	3.	139.082.200	280.813.300
Penempatan Pada Bank Lain	4.	4.983.850.880	12.842.702.823
Kredit yang Diberikan	5.	10.434.558.400	9.993.704.968
PPKA Kredit Yang Diberikan	5.	-	(855.240.806)
	5.	(938.680.128)	-
Aset Tetap dan Inventaris	6.	787.210.600	791.845.600
Akm Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	6.	(685.605.788)	(632.679.203)
Aset Tidak Berwujud	7.	10.824.989	11.666.662
Aset Lain-lain	8.	136.902.883	113.719.306
Jumlah Aset		14.868.144.035	22.546.532.453
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera Dibayar	9.	27.840.699	71.916.344
Utang Bunga	10.	4.983.407	6.158.641
Tabungan	11.	5.894.671.872	13.395.458.895
Deposito Berjangka	12.	1.737.854.000	1.620.000.000
Simpanan Dari Bank Lain	13.	609.936.136	1.274.860.733
Kewajiban Lain-lain	14.	40.020.564	412.000
Jumlah Kewajiban		8.315.306.678	16.368.806.613
EKUITAS			
Modal Saham	15.	4.000.000.000	4.000.000.000
Cadangan Umum	16.	500.000.000	500.000.000
Cadangan Tujuan	16.	204.852.847	204.852.847
Laba Ditahan	16.	1.472.872.992	1.802.456.486
Saldo Laba (Rugi)	16.	375.111.518	(129.583.494)
Jumlah Ekuitas		6.552.837.357	6.177.725.839
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.868.144.035	22.546.532.453

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.



PT. BPR ARTHA MORO
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2025	31 Des 2024
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Bunga	17.	2.096.233.178	1.418.170.931
Pendapatan Provisi dan Administrasi	18.	45.590.121	130.588.540
Pendapatan Operasional Lainnya	19.	254.362.311	606.935.341
Jumlah Pendapatan Operasional		2.396.185.610	2.155.694.811
Beban Operasional			
Beban Bunga	20.	330.785.458	489.071.753
Beban Penyisihan Kerugian	21.	269.735.483	661.893.409
Beban Pemasaran	22.	1.800.000	42.055.200
Beban Administrasi dan Umum	23.	1.340.819.246	1.147.508.739
Beban Operasional Lainnya	24.	133.667.289	59.529.124
Jumlah Beban Operasional		2.076.807.476	2.400.058.225
Laba (Rugi) Usaha		319.378.134	(244.363.414)
Pendapatan dan (Beban) Non-Operasional			
Pendapatan non-operasional	25.	55.941.384	146.279.920
Beban non-operasional	25.	208.000	31.500.000
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional		55.733.384	114.779.920
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		375.111.518	(129.583.494)
Taksiran Pajak Penghasilan	26.	-	-
Laba (Rugi) Neto		375.111.518	(129.583.494)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Sragen, 16 April 2026

Henry Yulian, SE
Direktur Utama
ARTHA MORO

PT. BPR ARTHA MORO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Labai/Rugi Yang Belum Direalisasi	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2023	2.500.000.000						204.852.847	500.000.000	1.602.456.486	4.807.309.333
Dividen										-
Pembentukan Cadangan										-
DSM Ekuitas										-
Labai/Rugi yang Belum Direalisasi										-
Revaluasi Aset Tetap										-
Labai/Rugi Periode Berjalan									(129.583.494)	(129.583.494)
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	1.500.000.000		-	-	-	-	-	-	-	1.500.000.000
Saldo per 31 Desember 2024	4.000.000.000		-	-	-	-	204.852.847	500.000.000	1.472.872.992	6.177.725.839
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSM Ekuitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Labai/Rugi yang Belum Direalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Labai/Rugi Periode Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	375.111.518	375.111.518
Pos Penambah/Pengurang Lainnya										-
Saldo per 31 Desember 2025	4.000.000.000		-	-	-	-	204.852.847	500.000.000	1.847.984.510	6.552.837.357

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT. BPR ARTHA MORO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Penerimaan pendapatan bunga	2.096.233.178	1.411.918.377
Penerimaan pendapatan provisi, komisi dan premi	45.590.121	130.588.540
Penerimaan klaim asuransi	-	-
Pembayaran beban klaim asuransi	-	-
Pembayaran beban bunga	(330.785.458)	(489.071.753)
Pendapatan operasional lainnya	254.362.311	606.935.341
Beban operasional lainnya	(133.667.289)	(59.529.124)
Beban gaji dan tunjangan	(938.172.130)	(753.075.750)
Beban umum dan administrasi	(536.975.018)	(906.558.478)
Beban nonoperasional	(208.000)	(31.500.000)
Pendapatan nonoperasional	55.941.384	146.279.920
Pembayaran pajak penghasilan badan		
Penurunan/(kenaikan) atas aset operasional:		
Penempatan pada bank lain	7.858.851.743	(8.070.572.738)
Kredit yang diberikan	(440.853.432)	433.311.693
Aset lain-lain	(23.183.575)	(18.605.490)
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan		
Kenaikan/(penurunan) atas liabilitas operasional:		
Liabilitas segera	(45.250.879)	12.185.394
Tabungan	(7.500.787.023)	9.132.640.888
Deposito	117.854.000	(579.500.000)
Simpanan dari bank lain	(664.924.597)	(992.362.834)
Pinjaman yang diterima	-	(1.314.511.724)
Liabilitas imbalan kerja	-	-
Liabilitas lain-lain	39.608.564	(2.480.861)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional	(148.368.100)	(1.343.908.600)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	4.635.000	(11.819.000)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi	4.635.000	(11.819.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembagian Dividen		
Penambahan Cadangan Umum	-	1.500.000.000
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	1.500.000.000
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(141.731.100)	144.272.400
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	280.813.300	136.540.900
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	139.082.200	280.813.300

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT. BPR ARTHA MORO
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik		-
2. Fasilitas kredit kepada nasabah dan belum ditarik		-
3. Lain-lain		-
Jumlah Komitmen	-	-
KONTIJENSI		
1. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	1.727.599.738	1.511.987.000
2. Aset produktif yang dihapusbukukan	104.540.050	104.581.000
3. Lain-lain		-
Jumlah Kontijensi	1.832.139.788	1.616.568.000

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

2. Iktisar Kebijakan Akuntansi

a. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

b. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dalam Bahasa Indonesia.

c. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Direksi BPR bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

d. Mata Uang Pelaporan

1) Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi BPR menggunakan mata uang selain dari rupiah, maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, BPR menggunakan kurs sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

2) Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3) Transaksi dalam mata uang asing harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

e. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan

BPR menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akuntansi akrual, kecuali untuk informasi arus kas. Dalam dasar akrual, BPR mengakui aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau beban ketika definisi dan kriteria pengakuan terpenuhi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.36).

f. Laporan Posisi Keuangan

1) Aset

Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan sumber manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan diterima BPR. (Hal ini mengacu pada SAK EP lampiran B).

Adapun pos-pos yang merupakan aset keuangan seperti surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit, dan penyertaan modal disertai dengan pos pengurang berupa CKPN.

BPR menghitung Penyisihan Penghapusan Kualitas Aset (PPKA) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai kualitas aset BPR. Apabila nilai PPKA lebih besar dari CKPN yang dibentuk BPR sesuai dengan SAK EP, maka selisih nilai PPKA dengan CKPN menjadi faktor pengurang dalam perhitungan modal inti BPR.

BPR mengakui aset dalam laporan posisi keuangan ketika kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan akan mengalir ke BPR dan nilai aset dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.37).

a) Kas

Kas adalah mata uang kertas atau logam dalam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin anjungan tunai mandiri (ATM), dan kas dalam perjalanan. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins / notes*), dan mata uang emas.

b) Kas dalam valuta asing

Kas dalam valuta asing adalah uang kertas asing (*banknotes*) dan traveller's cheque yang masih berlaku yang dimiliki BPR dalam kegiatan penukaran sebagai pedagang valuta asing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. SAK EP Bab 30 tentang Penjabaran Valuta Asing. BPR dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Mata uang asing diakui sebesar kurs transaksi (*spot rate*) yang berlaku pada tanggal perolehan/transaksi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 30.7). Pada setiap tanggal pelaporan BPR menjabarkan kas dalam valas ke rupiah

dengan kurs penutup. Kurs penutup yang dirujuk adalah kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan dengan menggunakan kurs tengah yaitu kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli mata uang asing Bank Indonesia dibagi dua. Kas dalam valuta asing disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar nilai nominal.

c) Surat Berharga

Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah Pusat Republik Indonesia, dan/atau Pemerintah Daerah.

Surat berharga diukur pada biaya perolehan ditambah / dikurangi biaya transaksi. Contoh biaya transaksi yaitu *brokerage fee*. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

d) Penempatan Pada Bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan / tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain baik konvensional maupun syariah dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*. Cakupan penempatan pada bank lain adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan penempatan dana lainnya yang sejenis. Nilai tercatat penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat liabilitas pada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

- Giro, merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.
- Tabungan, merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Deposito, merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan deposit on call. Deposit on call merupakan deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

- Sertifikat deposito, merupakan simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.
- Penempatan pada bank syariah, merupakan penempatan dana BPR pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah. Perlakuan akuntansi merujuk kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Giro, deposito, dan tabungan pada bank lain pada umumnya dicatat sebesar biaya perolehan, kecuali untuk produk sertifikat deposito dengan diskonto. Pengukuran selanjutnya, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi CKPN. CKPN penempatan pada bank lain disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari penempatan tersebut.

e) Kredit yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang.

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi termasuk provisi. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

Pada saat penandatanganan perjanjian Kredit dengan debitur, BPR mengakui sebagai “kewajiban komitmen fasilitas Kredit yang diberikan kepada debitur” sebesar Plafon Kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan Kredit yang disepakati BPR dengan debitur, kecuali untuk penerusan Kredit. Jumlah kewajiban komitmen fasilitas Kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu Kredit sesuai jenis Kreditnya.

Kredit disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Kredit sindikasi disajikan berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR, termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud. Kredit kelolaan disajikan pada pos “Kredit yang Diberikan” berdasarkan porsi Kredit yang

risikonya ditanggung BPR termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud.

Pendapatan bunga dari Kredit (yang diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang pada saat pengakuan awal Kredit atau pada saat penyesuaian suku bunga Kredit) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan sebagai tagihan bunga Kredit atau pendapatan bunga Kredit yang akan diterima.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Selisih kurang antara perubahan estimasi arus kas atas Restrukturisasi Kredit dibandingkan dengan nilai tercatat diperhitungkan sebagai kerugian kredit.

Kredit restrukturisasi disajikan menjadi bagian dari Kredit.

Penghapusbukuan Kredit (hapus buku) adalah tindakan administratif BPR untuk memindahkan nilai yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan tanpa mengurangi hak tagih BPR kepada debitur secara kontrak. Pada saat kredit dihapus buku, BPR telah membentuk CKPN sebesar 100%.

Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat Kredit dengan menjurnal balik CKPN – Kredit yang diberikan. Kredit yang dihapus buku disajikan dalam Rekening Administratif. Setoran yang diterima dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku diakui sebagai Pendapatan Hapus Buku (Pendapatan Operasional Lainnya).

f) Penyertaan Modal

Penyertaan Modal adalah penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar dan SAK EP Bab 14 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi.

BPR mencatat seluruh investasi pada entitas asosiasi menggunakan salah satu metode yaitu metode biaya atau metode ekuitas.

Penghasilan dividen dari investasi pada entitas asosiasi diakui pada saat hak grup untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Penghasilan dividen termasuk dalam penghasilan lain.

BPR mengklasifikasikan investasi pada entitas asosiasi sebagai aset tidak lancar. (Hal ini mengacu SAK EP paragraf 14.11).

g) Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang Diambil Alih selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan

secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR).

Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan. Nilai Wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Nilai Tercatat adalah nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi cadangan rugi penurunan nilai. AYDA yang dicatat dalam laporan posisi keuangan hanya yang berasal dari penyelesaian kredit melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. BPR memperhitungkan AYDA yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sesuai dengan POJK mengenai kualitas aset BPR.

Pada saat pengakuan awal, AYDA dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Setelah pengakuan awal, AYDA dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Apabila AYDA mengalami penurunan nilai, maka BPR mengakui rugi penurunan nilai tersebut.

Apabila AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, maka BPR mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.

AYDA tidak dilakukan depresiasi.

Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat AYDA dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian operasional.

Hasil penjualan agunan yang dikuasai diakui sebagai pengurang tagihan yang terkait dengan kredit.

Biaya transaksi dalam proses pengurusan AYDA dapat dikapitalisasi sepanjang nilai AYDA lebih besar dibandingkan nilai tercatat kredit setelah ditambah kapitalisasi biaya transaksi.

AYDA disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar mana yang lebih rendah, antara: nilai tercatat kredit; atau nilai wajar setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual.

h) Aset Tetap

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.2). Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 17 tentang Aset Tetap, SAK EP Bab 20 tentang Sewa dan SAK EP Bab 27 tentang Penurunan Nilai Aset.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sesuai PMK No. 72 Tahun 2023.

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tetap tersedia untuk digunakan dan penyusutannya dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

i) Properti Terbengkalai

Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR). Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 16 tentang Properti Investasi.

j) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 18.2). Bab ini hanya diterapkan untuk akuntansi seluruh aset takberwujud selain goodwill.

Pengakuan awal aset tak berwujud diakui sebesar biaya perolehan.

BPR mengukur aset tak berwujud pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tak berwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya dan diakui sebagai beban setiap periode dengan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sesuai PMK No. 72 Tahun 2023.

Penurunan nilai aset tak berwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya.

k) Aset lainnya

Aset Lainnya adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Komponen aset lainnya, antara lain:

Pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka, Mata uang kertas dan logam yang ditarik, Piutang dari perusahaan asuransi, Aset Pajak Tangguhan, Aset Keuangan Lainnya, Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima, Lainnya.

Aset lainnya disajikan secara gabungan, kecuali komponennya memiliki nilai yang material, maka komponen tersebut disajikan tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

l) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar.

CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Pada setiap akhir periode pelaporan, BPR menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.21).

Alur pembentukan CKPN sebagai berikut:

Langkah Pertama: Penilaian Pemenuhan Kriteria Aset Baik

BPR melakukan penilaian apakah aset keuangan memenuhi kriteria aset baik. Kriteria aset baik sebagai berikut:

- Aset keuangan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia; aset keuangan dijamin oleh LPS; dan/atau aset keuangan tidak memiliki tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari dan tidak pernah dilakukan restrukturisasi. Dalam hal BPR melakukan perpanjangan kredit tanpa melihat kemampuan membayar debitur, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kredit dimaksud tidak tergolong aset baik.
- Apabila aset keuangan memenuhi kriteria aset baik, BPR dapat tidak membentuk CKPN atas aset keuangan tersebut; aset keuangan tidak memenuhi kriteria aset baik, BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan (Langkah Kedua).

Langkah Kedua: Penilaian Signifikansi

BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila aset keuangan signifikan, BPR melakukan penilaian terhadap aset keuangan tersebut secara individual (langkah ketiga); aset keuangan tidak signifikan, BPR membentuk CKPN secara kolektif.

Langkah Ketiga: Penilaian Individu Bukti Objektif Penurunan

BPR melakukan penilaian secara individual terhadap aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik dan signifikan. Penilaian dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan. Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN individual; tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN kolektif.

Periode evaluasi penurunan nilai, bahwa setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, BPR mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai. Dalam hal BPR melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka BPR mengestimasi kembali arus kas masa datang dan CKPN untuk kredit tersebut.

Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut, bahwa BPR melakukan konsolidasi dengan kepemilikan yang sama; BPR melakukan akuisisi dan/atau penggabungan usaha; dan/atau BPR mengganti aplikasi inti perbankan atau sistem pencatatan transaksi, yang menyebabkan BPR belum dapat menyediakan data untuk perhitungan CKPN kolektif maka pembentukan CKPN kolektif dapat menggunakan peer group data sampai dengan BPR memiliki data historis untuk perhitungan CKPN kolektif minimal 2 (dua) tahun periode bisnis normal.

Sesuai kondisi BPR saat ini, bahwa kebijakan metode perhitungan CKPN PT BPR Artha Moro berdasarkan Keputusan Direksi PT. BPR Artha Moro Nomor: 220/DIR/BPR-AM/IX/2025 Tentang Penerapan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) tanggal 09 September 2025.

Pada pembentukan CKPN, perusahaan menggunakan metode Prospektif.

2) Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BPR. Penyelesaian kewajiban kini biasanya melibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.20, paragraf 2.21, dan lampiran B).

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan ketika:

- BPR memiliki kewajiban pada akhir periode pelaporan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu;
- Kemungkinan besar BPR akan menyelesaikan liabilitas tersebut dengan menyerahkan asetnya; dan

- Nilai liabilitas dapat diukur secara andal.

a) Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Simpanan merupakan liabilitas keuangan. Pengakuan awal sebesar nilai sekarang kas yang disampaikan ke BPR dikurangi biaya transaksi. Pengukuran selanjutnya menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Jika tidak terdapat biaya transaksi, nilai pada umumnya sama dengan jumlah kas yang akan dibayarkan dan tidak didiskontokan.

Bentuk-bentuk simpanan berupa:

- Tabungan, adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung. Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan. Dalam hal terdapat amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan maka diakui sebagai beban bunga. Perhitungan beban bunga menggunakan suku bunga efektif. Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.
- Deposito, adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan BPR. Deposito yang dimaksud adalah deposito yang berjangka waktu. Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Setoran deposito diakui pada saat uang diterima. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito. Amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada deposito diakui sebagai beban bunga. Deposito disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.
- Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

b) Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah liabilitas BPR berupa tabungan dan deposito dari bank lain di Indonesia. Simpanan dari bank lain berupa

tabungan dan deposito. Simpanan dari bank lain tidak termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos pinjaman yang diterima.

Tabungan dari bank lain, bahwa transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain. Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan. Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan.

Deposito dari bank lain, bahwa transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Setoran deposito diakui pada saat uang diterima. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito. Deposito dari bank lain disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga.

c) Liabilitas Segera

Liabilitas segera adalah liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Liabilitas segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain. Tidak termasuk dalam liabilitas segera adalah utang bunga.

Jenis liabilitas segera antara lain: penutupan rekening deposito jatuh tempo; titipan nasabah; selisih lebih hasil penjualan agunan milik nasabah; dividen yang belum dibayarkan; liabilitas kepada pemerintah yang harus dibayar; sanksi liabilitas membayar kepada otoritas yang belum dibayarkan; gaji/honor/upah yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan. Komponen-komponen tersebut apabila jumlahnya material dikelompokkan dalam pos tersendiri.

Transaksi liabilitas segera diakui pada saat liabilitas telah jatuh tempo; atau liabilitas menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak. Liabilitas segera dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

d) Utang

- Utang Bunga

Utang bunga merupakan seluruh liabilitas BPR berupa liabilitas bunga kepada nasabah yang belum dibayarkan dari simpanan berupa tabungan maupun deposito dari pihak ketiga bukan bank dan dari bank lain, pinjaman yang diterima dari bank, serta utang bunga lain.

Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi. Utang bunga antara lain terdiri dari Liabilitas bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga). Bunga deposito yang telah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah. Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil.

Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo. Penyajian Utang bunga disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

- Utang Pajak

Utang pajak adalah liabilitas pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR.

Dasar Pengaturan Utang Pajak ada pada SAK EP Bab 29 tentang Pajak Penghasilan dan juga PA BPR Bab XXIV tentang Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan.

Utang pajak mencakup utang pajak atas PPh Pasal 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhir masa pajak tahunan, yaitu selisih kurang kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan PPh Pasal 25 (angsuran pajak atau pajak dibayar di muka); dan/atau utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak.

Utang Pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke kas negara. Penyajian Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

e) Pinjaman

Pinjaman yang diterima adalah pinjaman yang diterima dari bank, Bank Indonesia dan/atau pihak ketiga bukan bank dengan kewajiban pembayaran kembali berdasarkan persyaratan perjanjian utang piutang. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat junior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.

Pengukuran awal yaitu pinjaman diakui sebesar nilai sekarang kas terutang (sebagai contoh, termasuk pembayaran bunga dan pelunasan pokok). (Hal ini mengacu pada SAK EP Paragraf 11.13). Pengukuran selanjutnya pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pinjaman diterima dapat berasal dari bank umum, BPR lain, Bank Indonesia, atau pihak lain. Pinjaman diterima yang berasal dari Bank Indonesia berupa fasilitas pendanaan jangka pendek untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPR. Jenis pinjaman yang diterima antara lain: pinjaman bilateral; pinjaman sindikasi; pinjaman

subordinasi; dan pinjaman khusus yang diterima dari lembaga pengayom maupun pinjaman dalam rangka linkage. Dalam ketentuan permodalan, pinjaman subordinasi masuk sebagai pinjaman dengan persyaratan tertentu sebagaimana POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Pinjaman yang diterima tidak termasuk: setoran keikutsertaan bank lain (bank peserta) dalam kredit sindikasi (pembiayaan bersama); atau dana yang diterima dalam rangka penerusan kredit (*channeling*).

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman, dikurangi bunga dibayar di muka jika ada (diskonto). Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan pinjaman dan diskonto diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui sebagai beban bunga. Bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai utang bunga. Penyajian Pinjaman yang diterima disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi.

Bunga yang masih harus dibayar disajikan dalam pos utang bunga. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh BPR disajikan sebagai tagihan komitmen pada pos fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik. Penempatan BPR berupa giro pada bank umum yang bersaldo kredit (*overdraft*) disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pinjaman diterima.

f) Dana Setoran Modal-Liabilitas

Dana Setoran Modal (DSM) – Liabilitas adalah dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk penambahan modal, namun belum memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DSM – Liabilitas tidak memenuhi kriteria instrumen ekuitas karena masih terdapat unsur ketidakpastian dimana BPR tetap memiliki liabilitas kontraktual sehingga harus mengembalikan dana tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan untuk diakui sebagai modal disetor sesuai dengan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat. Dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penysetor. Dana setoran modal yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan bagian dari ekuitas BPR.

Dana setoran modal yang diterima diakui sebagai DSM - Liabilitas. DSM - Liabilitas yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang

berlaku diakui sebagai DSM - Ekuitas. Penyajian DSM – Liabilitas disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan.

g) Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1). Liabilitas imbalan kerja adalah liabilitas yang timbul dari imbalan kerja.

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari: imbalan kerja jangka pendek; imbalan pascakerja; imbalan kerja jangka panjang lainnya; dan pesangon. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1).

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek: Secara umum diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto (*undiscounted amount*). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.5).

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah terdiskonto (*discounted amount*).

Khusus untuk liabilitas imbalan pascakerja program imbalan pastidan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya, BPR mengukurliabilitas pada total neto dari jumlah nilai kini liabilitas imbalan, dikurangi nilai wajar aset program (jika ada),pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.15 dan 28.30).

Khusus untuk pesangon, BPR mengakui pesangon sebagai beban dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pesangon tidak memberikan manfaat ekonomik kepada BPR di masa depan.Pesangon diakui sebagai liabilitas dan beban hanya ketika BPR menunjukkan komitmennya untuk melakukan pemberhentian kontrak kerja sebelum tanggal pensiun normal, yang ditunjukkan dengan rencana formal terperinci untuk menghentikan pekerja dan tidak terdapat kemungkinan yang realistis untuk membatalkan rencan a tersebut; atau memberikan pesangon sebagai hasil dari penawaran yang dilakukan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secara sukarela. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.34 dan 28.35). BPR mengukur pesangon pada estimasi terbaik dari pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban. Jika pesangon diberikan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secara sukarela, pengukuran pesangon didasarkan pada jumlah pekerja yang diperkirakan akan menerima tawaran tersebut. Jika pesangon jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, pesangon diukur pada nilai sekarang terdiskonto. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.36 dan 28.37).

Penyajian Liabilitas imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam posLiabilitas segera pada laporan posisi keuangan. Liabilitas imbalan kerja

jangka panjang disajikan dalam posliabilitas lainnya pada laporan posisi keuangan.

h) Liabilitas Lainnya

Liabilitas Lainnya merupakan pos yang mencakup liabilitas BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Termasuk dalam Liabilitas Lainnya antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas Lainnya diakui dalam hal BPR menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut dan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Penyajian Liabilitas Lainnya disajikan dalam pos Liabilitas Lain-Lain pada laporan posisi keuangan.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya (substance over form). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3 dan 22.4).

a) Modal

Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar.

Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif diterima BPR.

Agio yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Modal Sumbangan yaitu modal yang diterima BPR yang berasal dari sumbangan dalam bentuk dana atau aset lainnya.

b) Dana Setoran Modal (DSM) Ekuitas

DSM – Ekuitas yaitu dana yang telah disetor secara riil untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. (Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Perlakuan terhadap modal dilakukan sesuai ketentuan permodalan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara

lain Undang-Undang terkait perseroan terbatas, Undang-Undang terkait koperasi, POJK mengenai BPR, dan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

Modal disetor diakui pada saat BPR menerima setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar yang telah dikurangi biaya transaksi, jika ada. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.7 dan 22.8).

c) Saldo Laba

Saldo laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap (yang telah masuk sebagai bagian saldo laba).

Saldo laba umumnya dikelompokkan menjadi:

- (1) Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.
- (2) Cadangan Tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
 - (a) Laba Tahun Lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - (b) Laba Tahun Berjalan.

Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan pembagian dividen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

g. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

1) Penghasilan dan Beban

Penghasilan diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi peningkatan manfaat ekonomik masa depan terkait peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.41).

Penghasilan terdiri dari:

a) Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan Operasional terdiri dari pendapatan bunga, yaitu pendapatan dari penanaman dana BPR dalam bentuk aset produktif; dan pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional

yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

(1) Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari perjanjian kredit diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Pendapatan Bunga terdiri dari:

- Pendapatan Bunga Kontraktual, yaitu pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan perjanjian dengan pihak lain atas surat berharga, penempatan pada bank lain, atau kredit yang diberikan (tidak termasuk amortisasi provisi atau biaya transaksi);
- Provisi Kredit, yaitu pendapatan yang diterima BPR atas kredit yang diberikan. Provisi diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi provisi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga.

Amortisasi provisi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing. Pada saat kredit non-performing, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi provisi.

- Biaya Transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan sertifikat Bank Indonesia, penempatan pada bank lain serta kredit yang diberikan. Biaya Transaksi mencakup semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal Biaya Transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit.

Biaya Transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi biaya transaksi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

Amortisasi Biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing. Pada saat kredit non-performing, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi biaya transaksi.

- Koreksi Pendapatan Bunga, yaitu koreksi pendapatan bunga akrual atas aset produktif yang mengalami penurunan kualitas atau

penurunan nilai, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

(2) Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat. Bentuk pendapatan lainnya antara lain:

- Pendapatan jasa transaksi (seperti payment point dan ATM);
- Keuntungan dari penjualan valuta asing;
- Keuntungan penjualan surat berharga;
- Penerimaan aset produktif yang dihapus buku;
- Pemulihan CKPN aset keuangan;
- Dividen;
- Keuntungan dari penyertaan dengan equity method;
- Keuntungan penjualan AYDA;
- Pendapatan ganti rugi asuransi; dan
- Pemulihan penurunan nilai AYDA.

Pendapatan Lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

b) Beban Operasional

Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan usaha utama BPR.

Beban diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi penurunan manfaat ekonomik masa depan terkait penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.42).

Beban operasional diakui secara akrual, yaitu dampak daritransaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Beban Operasional terdiri dari:

(1) Beban Bunga

Beban bunga, yaitu beban bunga atas kegiatan penghimpunan dana atau penerimaan pinjaman BPR, seperti tabungan atau deposito, pinjaman dari Bank Indonesia atau bank lain. Beban Bunga termasuk amortisasi biaya transaksi dan provisi pinjaman yang diterima serta amortisasi biaya promosi yang dapat diatribusikan secara langsung pada rekening tabungan atau deposito. Beban Bunga antar kantor tidak dilaporkan pada pos ini tetapi dilaporkan pada pos beban non

operasional sesuai ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

(2) Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit

Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit, yaitu amortisasi cadangan kerugian yang timbul atas penurunan nilai kredit akibat restrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kelebihan CKPN aset keuangan karena perbaikan kualitas kredit dalam rangka restrukturisasi.

(3) Beban Kerugian Penurunan Nilai

Beban kerugian penurunan nilai, yaitu CKPN aset produktif antara lain berupa kredit yang diberikan, surat berharga yang dimiliki, dan penempatan pada bank lain. Detil mengenai kerugian penurunan nilai dapat merujuk standar akuntansi keuangan mengenai instrumen dasar. Pembentukan beban kerugian penurunan nilai sebesar nilai tercatat kredit yang diberikan tidak semata merupakan penghentian pengakuan karena BPR masih memiliki hak kontraktual atas penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari kredit yang diberikan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, BPR mengakui dan mengukur berdasarkan bukti objektif. Jika pada periode berikutnya, jumlah beban kerugian penurunan nilai menurun, maka BPR menyajikan jumlah perbaikan pada pemulihan CKPN pada pendapatan operasional lainnya.

(4) Beban Pemasaran

Beban pemasaran, yaitu biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan BPR antara lain biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan BPR, biaya pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah, dan biaya iklan untuk promosi.

(5) Beban Penelitian dan Pengembangan

Beban Penelitian dan Pengembangan, yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR. Termasuk pada pos ini yaitu: (1) biaya perjalanan dan akomodasi terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR, (2) biaya penelitian dan pengembangan untuk pendirian dan pembukaan kantor cabang BPR, dan (3) beban pengeluaran yang terjadi secara internal pada suatu item aset tak berwujud.

(6) Beban Administrasi dan Umum

Beban Administrasi dan Umum, termasuk beban tenaga kerja, beban pendidikan dan pelatihan, beban sewa, beban penyusutan / penghapusan atas aset tetap dan inventaris, beban amortisasi aset tak

berwujud, beban premi asuransi, beban pemeliharaan dan perbaikan, beban barang & jasa, beban penyelenggaraan teknologi informasi, kerugian terkait risiko operasional, dan pajak-pajak.

(7) Beban Lainnya

Beban Lainnya, yaitu beban operasional lainnya termasuk kerugian penjualan valuta asing, kerugian penjualan surat berharga, kerugian dari penyertaan dengan *equity method*, kerugian penjualan AYDA, kerugian penurunan nilai AYDA, dan biaya pungutan OJK.

Beban-beban lain seperti beban pemasaran, beban penelitian dan pengembangan, dan beban administrasi dan umum diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

2) Pendapatan dan Beban Non Operasional

a) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non operasional merupakan semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Non operasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. BPR mengakui pendapatan non operasional menggunakan dasar akuntansi akrual, yaitu diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk akun tersebut.

Pendapatan Non Operasional terdiri dari:

- Keuntungan penjualan, yaitu keuntungan karena penjualan aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Pemulihan penurunan nilai, termasuk penurunan nilai wajar atas aset tetap dan inventaris milik BPR yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai;
- Bunga antar kantor, yaitu pendapatan bunga yang berasal dari transaksi antar kantor. Pelaporan pendapatan bunga antar kantor untuk laporan per kantor dilaporkan secara tidak saling hapus dengan beban bunga antar kantor (*gross*), sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting / net*);
- Selisih kurs, yaitu keuntungan selisih kurs berupa selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya;
- Pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga yang tidak dapat dikelompokkan seperti di atas. Termasuk pada pos ini yaitu pendapatan

yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus tagih; sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

b) Beban Non Operasional

- Kerugian penurunan nilai, yaitu kerugian atas penurunan nilai wajar aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Bunga antar kantor, yaitu beban bunga atas dana yang berasal dari transaksi antar kantor. Pelaporan beban bunga antar kantor untuk keperluan laporan keuangan bertujuan umum secara gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting / net*);
- Selisih kurs, yaitu kerugian selisih kurs berupa selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya; dan
- Beban lainnya, termasuk sanksi administratif berupa denda karena suatu pelanggaran dan sumbangan.

3) Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan

a) Pajak Kini

Pajak kini adalah pajak penghasilan terutang (dapat dipulihkan) terkait dengan laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalan atau periode lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi BPR sebagai bagian dari biaya operasional. Pengakuan ini harus dilakukan pada periode pelaporan yang sesuai dengan prinsip akrual, yaitu beban pajak harus diakui pada saat pendapatan diperoleh atau biaya terjadi, bukan pada saat pembayaran dilakukan.

Beban pajak penghasilan diukur berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada periode pelaporan yang bersangkutan. Tarif pajak yang digunakan dapat berbeda tergantung pada jenis pendapatan atau pengeluaran, serta peraturan pajak yang berlaku.

b) Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan terutang atau dapat dipulihkan pada periode mendatang, umumnya sebagai hasil dari BPR memulihkan atau menyelesaikan aset dan liabilitas pada jumlah tercatat kini, dan dampak pajak dari akumulasi rugi pajak kini belum dikompensasi dan kredit pajak kini belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

Aset pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer dapat dikurangkan di masa depan. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Aset pajak tangguhan juga diakui untuk akumulasi

rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.12 dan 29.21)

Liabilitas pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer kena pajak.

Liabilitas dan aset pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

4) Laporan Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain adalah item penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi yang disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan.

Penghasilan komprehensif lain timbul dari poin dalam SAK EP Bab5 Paragraf 5.4 (b). Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasi aset tetap. Surplus revaluasi aset tetap tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasi aset tetap bila BPR memilih kebijakan akuntansi revaluasi untuk aset tetapnya (lihat bab IX tentang Aset Tetap dan Inventaris). Surplus revaluasi aset tetap tidak di reklasifikasikan ke laba rugi.

h. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasi perubahan kas dan setara kas BPR untuk periode pelaporan. Laporan arus kas menunjukkan secara terpisah penerimaan dan pengeluaran kas BPR dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.1)

Aktivitas operasi adalah aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi BPR dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi ekuitas dan pinjaman BPR yang dikontribusikan.

BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung, dengan metode ini pos-pos utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.7)

1) Kas terdiri atas:

- a) kas dalam rupiah dan kas dalam valuta asing;
- b) rekening giro pada bank lain;
- c) tabungan pada bank atau BPR lain.

- 2) Setara kas, antara lain:
 - a) surat berharga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b) deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- i. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, item penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, dampak perubahan dalam kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut dan (tergantung pada format laporan dari perubahan ekuitas yang dipilih oleh BPR) jumlah transaksi dengan pemilik yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemilik selama periode tersebut.
- j. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPR. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
- k. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada BPR dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lainnya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.3).

BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas keuangan sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya dan tidak hanya dari bentuk hukumnya (*substance over form*). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A).

Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan jika BPR harus menyelesaikan kewajiban kontraktualnya melalui penyerahan kas atau aset lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A).
- l. Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode pengalokasian penghasilan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama umur instrumen keuangan ke jumlah tercatat aset atau liabilitas keuangan tersebut. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.16).
- m. Pengukuran Aset Non Keuangan dan Liabilitas Non Keuangan

Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46).

Selanjutnya aset dan liabilitas diukur dengan dasar pengukuran lainnya sebagai berikut:

- Semisal Aset Tetap yaitu dengan model biaya, diukur pada yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai dengan jumlah terpulihkan; atau Model revaluasi, diukur pada yang lebih rendah antara jumlah revaluasian dan jumlah terpulihkan.
 - BPR mengakui kerugian penurunan nilai terkait aset non keuangan yang digunakan atau dikuasai untuk dijual, sebagai contoh aset yang diambil alih.
 - SAK EP mengizinkan atau mensyaratkan pengukuran pada nilai wajar untuk: investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang diukur BPR pada nilai wajar; properti investasi yang diukur BPR pada nilai wajar; dan aset tetap yang diukur BPR dengan model revaluasi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.50).
 - Kebanyakan liabilitas selain liabilitas keuangan diukur pada estimasi terbaik atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.51).
- n. Pengukuran Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
- Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas keuangan pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46) Selanjutnya aset dan liabilitas diukur dengan dasar pengukuran lainnya sebagai berikut:
- BPR mengukur aset keuangan dasar dan liabilitas keuangan dasar pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) dikurangi penurunan nilai. Pengukuran ini dikecualikan untuk: investasi dalam saham preferen yang tidak dapat dikonversi; dan saham biasa atau saham preferen tanpa opsi jual yang diperdagangkan secara publik atau yang nilai wajarnya dapat diukur dengan andal tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Investasi dan saham di atas diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.47).
 - Aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali disyaratkan lain oleh SAK EP. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.48)
 - Biaya perolehan diamortisasi aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah nilai bersih dari: jumlah saat pengakuan awal; dikurangi setiap pelunasan pokok; ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan dikurangi penurunan nilai (untuk aset keuangan). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.15).
- o. Saling Hapus
- BPR tidak diperbolehkan melakukan saling hapus aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban. Saling hapus hanya diperbolehkan dalam rangka penyajian untuk transaksi yang memiliki sifat yang sama, sebagai contoh keuntungan selisih kurs dan kerugian selisih kurs.

- Pengukuran aset secara neto dengan nilai penyisihan bukan merupakan saling hapus.
- Jika aktivitas operasi normal BPR tidak mencakup pembelian atau penjualan aset tidak lancar, maka BPR melaporkan Keuntungan dan kerugian pelepasan aset tersebut dengan cara mengurangi hasil pelepasan dengan jumlah tercatat asetnya dan beban penjualan terkait. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.52)

3. Catatan atas Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR ARTHA MORO

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025 (Audited)	2024 (Audited)
3. Kas		
Akun ini terdiri dari		
Kas	139.082.200	280.813.300
Jumlah Kas	139.082.200	280.813.300
4. Penempatan pada Bank Lain		
Akun ini terdiri dari:		
<u>Giro</u>		
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (003621695018)	-	540.399.157
PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (014001001988304)	845.747.051	1.876.310.860
PT. Bank Mandiri	54.033.057	54.197.755
PT. Bank Negara Indonesia	406.481.731	805.692.371
Jumlah Giro	1.306.261.839	3.276.600.143
<u>Tabungan</u>		
Bank Danamon Syariah (003573908880)	111.340.316	2.939.100
PT. BPD Jawa Tengah (2010087891)	427.707.183	1.722.177.422
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (1380012423658)	992.581.514	1.812.248.863
PT. Bank Muamalat	-	1.002.334.033
PT. BPR Sukowati Sragen	2.351.262	992.672.960
PT. BPR Bank Djoko Tingkir	13.608.766	1.003.730.103
Jumlah Tabungan	1.547.589.041	6.538.102.481
<u>Deposito</u>		
PT. BPD Jawa Tengah (125649)	30.000.000	30.000.000
PT. BPR Mira Banaran	500.000.000	-
PT. BPR Kartasura Makmur	300.000.000	-
PT. BPR Lawu Artha	-	-
PT. BPR Saribumi 1	500.000.000	500.000.000
PT. BPR Saribumi 2	500.000.000	500.000.000
PT. BPRS Sukowati Sragen 1	-	500.000.000
PT. BPRS Sukowati Sragen 2	300.000.000	500.000.000
PT. BPRS Hikmah Khazanah 1	-	1.000.000.000
Jumlah Deposito	2.130.000.000	3.030.000.000
Jumlah Simpanan	4.983.850.880	12.842.702.623
Penyisihan Aset Produktif	-	-
CKPN - ABA	-	-
Jumlah Antar Bank Aset	4.983.850.880	12.842.702.623

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR ARTHA MORO

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025 (Audited)	2024 (Audited)		
5. Kredit yang Diberikan				
Akun ini terdiri dari:				
a. Berdasarkan Jenis Kredit				
Kredit Modal Kerja	7.944.689.404	7.183.494.112		
Kredit Konsumsi	2.558.773.060	2.826.290.191		
Kredit-Provisi, Administrasi & Biaya Transaksi	(56.581.730)	(15.057.851)		
Cadangan Kerugian Resch	(12.322.334)	-		
Pendapatan Bunga Ditangguhkan	-	(1.021.484)		
Jumlah	10.434.558.400	9.993.704.968		
Penyisihan Kerugian Kredit		(855.240.806)		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(938.680.128)			
Jumlah Kredit yang Diberikan	9.495.878.272	9.138.464.162		
b. Berdasarkan Kolektabilitas				
Lancar	4.821.317.905	4.439.826.902		
Dalam Perhatian Khusus	1.038.954.024	1.200.574.510		
Kurang Lancar	250.511.336	498.825.962		
Diragukan	754.757.696	492.574.856		
Macet	3.637.921.509	3.377.982.073		
Kredit-Provisi, Administrasi & Biaya Transaksi	(56.581.730)	(15.057.851)		
Cadangan Kerugian Resch	(12.322.334)			
Pendapatan Bunga Ditangguhkan	-	(1.021.484)		
Jumlah	10.434.558.400	9.993.704.968		
Penyisihan Kerugian Kredit	-	(855.240.806)		
CKPN - Kredit	(938.680.128)	-		
Jumlah Kredit yang Diberikan	9.495.878.272	9.138.464.162		
6. Aktiva Tetap dan Inventaris				
Akun ini terdiri dari:				
31-Des-25	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Harga Perolehan:				
Kendaraan	494.260.000		15.900.000	478.360.000
Inventaris	297.585.600	11.265.000		308.850.600
Jumlah Harga Perolehan	791.845.600	11.265.000	15.900.000	787.210.600
31-Des-25	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Akumulasi Penyusutan				
Akm Penyusutan	632.679.203	52.926.585		685.605.788
Jumlah Akm Penyusutan	632.679.203	52.926.585	-	685.605.788
Nilai Buku Aset Tetap	159.166.397			101.604.812

S

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR ARTHA MORO

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			2025 (Audited)	2024 (Audited)
31-Des-24	Saldo Awal Rp.	Penambahan Rp.	Pengurangan Rp.	Saldo Akhir Rp.
Harga Perolehan:				
Kendaraan	494.260.000		-	494.260.000
Inventaris	285.766.600	11.819.000	-	297.585.600
Jumlah Harga Perolehan	780.026.600	11.819.000	-	791.845.600
Akumulasi Penyusutan				
Akm Penyusutan	569.091.876	63.587.327	-	632.679.203
Jumlah Akm Penyusutan	569.091.876	63.587.327	-	632.679.203
Nilai Buku Aset Tetap	210.934.724			159.166.397
7. Aset Tidak Berwujud				
Akun ini terdiri dari:				
Software Program			51.200.000	45.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud			(40.375.011)	(33.333.338)
Jumlah Aset Tidak Berwujud			10.824.989	11.666.662
8. Aset Lain-lain				
Akun ini terdiri dari:				
Asuransi Mobil			-	351.683
Deposito PPOB			41.194.076	40.932.085
Premi OJK			2.900.000	2.900.000
Persediaan Barang			-	500.000
Asuransi Brankas			-	797.500
Biaya Dibayar Dimuka			33.249.996	-
Sewa Gedung			-	13.750.003
Premi Penjaminan LPS Dibayar			4.635.711	116.696
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima			54.923.100	54.371.341
Jumlah Aset Lain-lain			136.902.883	113.719.308
9. Kewajiban Segera Dibayar				
Akun ini terdiri dari:				
Pajak Penghasilan Pasal 21			402.500	500.000
PPh 23 Perusahaan			135.000	-
Pajak Atas Bunga Tabungan			618.497	2.462.043
Pajak Atas Bunga Deposito			1.549.459	1.632.543
Titipan Nasabah			19.479.800	14.646.500
Jamsostek			5.655.443	52.675.258
Jumlah Kewajiban Segera Dibayar			27.840.699	71.916.344

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR ARTHA MORO

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025 (Audited)	2024 (Audited)
10. Utang Bunga		
Akun ini terdiri dari:		
Deposito Belum Jatuh Tempo	4.305.988	2.564.517
Simpanan Dari Bank Lain	677.419	3.594.124
Jumlah Utang Bunga	4.983.407	6.158.641
11. Tabungan		
Akun ini terdiri dari:		
Tabungan Wajib Kredit	190.819.633	369.344.975
Tabungan Mulyo	206.492.792	211.891.777
Tabungan Rakyat	3.512.316.031	11.135.557.998
Tabungan Hari Raya	1.929.920.718	1.642.602.898
Tabungan Simpel	55.122.698	36.061.247
Jumlah Tabungan	5.894.671.872	13.395.458.895
12. Deposito Berjangka		
Akun ini terdiri dari:		
Deposito 1 Bulan	25.000.000	25.000.000
Deposito 3 Bulan	931.854.000	885.000.000
Deposito 6 Bulan	40.000.000	183.000.000
Deposito 12 Bulan	741.000.000	527.000.000
Jumlah Deposito Berjangka	1.737.854.000	1.620.000.000
13. Simpanan Dari Bank Lain		
Akun ini terdiri dari:		
PD. BPR BKK Karangmalang	59.936.136	24.860.733
PD. BPR BKK Karangmalang	250.000.000	250.000.000
PD. BPR BKK Karangmalang	100.000.000	100.000.000
PD. BPR BKK Karangmalang	200.000.000	200.000.000
PT. BPR Surya Utama	-	200.000.000
PT. BPR Surya Utama	-	300.000.000
PT. BPR Gunung Mas	-	200.000.000
Jumlah Simpanan dari Bank Lain	609.936.136	1.274.860.733
14. Kewajiban Lain-lain		
Akun ini terdiri dari:		
Cadangan Tahara	3.870.610	412.000
Cadangan Tara	1.149.954	-
Tunjangan Hari Raya	35.000.000	-
Cadangan Imbalan Kerja	-	-
Jumlah Kewajiban Lain-lain	40.020.564	412.000

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR ARTHA MORO

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025 (Audited)	2024 (Audited)
15. Modal Saham		
Akun ini terdiri dari:		
Modal Dasar	6.000.000.000	6.000.000.000
Modal Belum Disetor	(2.000.000.000)	(2.000.000.000)
Jumlah Modal Disetor	4.000.000.000	4.000.000.000
16. Saldo Laba		
Akun ini terdiri dari:		
Cadangan Umum	500.000.000	500.000.000
Cadangan Tujuan	204.852.847	204.852.847
Laba Ditahan	1.472.872.992	1.602.456.486
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	375.111.518	(129.583.494)
Jumlah	2.552.837.357	2.177.725.839
17. Pendapatan Bunga		
Akun ini terdiri dari:		
a. Pendapatan Bunga Penempatan Pada Bank Lain		
Bunga Giro	38.826.001	42.184.621
Bunga Tabungan	40.528.848	33.665.241
Bunga Deposito Berjangka (ABA)	170.967.974	94.374.225
Jumlah Pendapatan Bunga Bank	250.322.824	170.224.088
b. Pendapatan Bunga Atas Kredit Yang Diberikan		
Pendapatan Bunga Kredit	1.845.910.354	1.247.946.843
Jumlah Pendapatan Bunga Pihak Ketiga Bukan Bank	1.845.910.354	1.247.946.843
Jumlah Pendapatan Bunga	2.096.233.178	1.418.170.931
18. Pendapatan Provisi Dan Administrasi		
Akun ini terdiri dari:		
Provisi dan Administrasi	45.590.121	130.588.540
Saldo Pendapatan Provisi dan Administrasi	45.590.121	130.588.540
19. Pendapatan Operasional Lainnya		
Akun ini terdiri dari:		
Penerimaan Kredit Hapus Buku	41.000	6.774.000
Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
- Kredit	-	510.317.921
- ABA	-	28.339.699
Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
- Kredit	186.296.161	-
- ABA	-	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR ARTHA MORO

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025 (Audited)	2024 (Audited)
Pendapatan Notaris	1.325.000	-
Denda Kredit	47.996.937	6.826.300
Administrasi Tabungan	12.772.663	11.879.224
Penalti Deposito	30.000	40.000
Operasional Lain-Lainnya	5.900.550	42.758.197
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	254.362.311	606.935.341
20. Beban Bunga		
Akun ini terdiri dari:		
Bunga Pihak Ketiga Bukan Bank - Tabungan	146.818.830	176.651.937
Bunga Pihak Ketiga Bukan Bank - Deposito	94.421.364	105.515.231
Bunga Pihak Ketiga Bukan Bank - Biaya Transaksi	-	16.620.369
Beban Kerugian Restruk Kredit	12.322.334	-
Bunga Bank Lain - Deposito	42.362.902	67.889.113
Bunga Bank Lain - Tabungan	2.075.403	4.637.166
Bunga Bank Lain - Pinjaman Yang Diterima	-	78.908.327
Premi Asuransi LPS	32.784.625	18.849.610
Jumlah Beban Bunga	330.785.458	499.071.753
21. Beban Penyisihan Kerugian		
Akun ini terdiri dari:		
Penempatan pada Bank Lain	-	28.339.699
Kredit yang Diberikan	-	633.553.710
Beban CKPN - Kredit	269.735.483	-
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian	269.735.483	661.893.409
22. Beban Pemasaran		
Akun ini terdiri dari:		
Pemasaran	1.800.000	42.055.200
Jumlah Beban Pemasaran	1.800.000	42.055.200
23. Beban Administrasi dan Umum		
Akun ini terdiri dari:		
Beban Tenaga Kerja	938.172.130	753.075.750
Beban Pendidikan dan Pelatihan	5.850.000	11.905.000
Beban Penyusutan	100.826.589	95.587.331
Biaya Asuransi	45.634.526	40.404.000
Beban Pajak	8.850.000	7.369.500
Beban Sewa	91.250.008	83.824.997
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	56.607.869	63.871.000
Beban Barang dan Jasa	93.628.124	91.471.151
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	1.340.819.246	1.147.508.739

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR ARTHA MORO


Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025 (Audited)	2024 (Audited)
24. Beban Operasional Lainnya		
Akun ini terdiri dari:		
Biaya Promosi	60.237.591	2.061.800
Biaya Rupa-rupa	6.912.000	5.090.000
Biaya Admin Bank	34.642.523	22.677.524
Iuran Perbarindo	7.500.000	11.050.000
Premi OJK	12.310.735	9.860.000
Biaya Notaris	5.000.000	5.500.000
Biaya Akomodasi	-	1.953.000
Fee Penagihan Kredit	5.606.100	300.000
Fee Deposito	1.458.340	1.036.800
Jumlah Beban Operasional Lainnya	133.667.289	59.529.124
25. Pendapatan dan (Beban) Non-Operasional		
Akun ini terdiri dari:		
Pendapatan Non-Operasional:		
Lainnya	55.941.384	146.279.920
Jumlah Pendapatan Non Operasional	55.941.384	146.279.920
Beban Non-Operasional:		
Jasa Audit KAP	-	-
Lainnya - Lainnya	208.000	31.500.000
Jumlah Beban Non Operasional	208.000	31.500.000
Jumlah Pendapatan dan (Beban) Non Operasional	55.733.384	114.779.920
26. Beban Pajak		
Akun ini terdiri dari:		
Beban Pajak Penghasilan	-	-
Jumlah Beban Pemasaran	-	-

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas pajak perusahaan dan tidak tertutup kemungkinan hasil pemeriksaan berbeda dengan saldo utang pajak tahun 2025 dan 2024 tersebut.

C. OPINI AKUNTAN PUBLIK



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00122/2.1358/AU.8/07/0906-21/IV/2026
Dewan Komisaris dan Direksi
PT. BPR Artha Moro

Opini Wajar Dengan Pengecualian
Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPR Artha Moro, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali mengenai pengaruh paragraph yang kami sebutkan di atas, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan PT. BPR Artha Moro terlampir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia.

Basis Opini Wajar Dengan Pengecualian
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Perusahaan belum mencadangkan liabilitas imbalan pasca kerja dalam laporan keuangannya sebagaimana diatur dalam SAK EP Bab 28 tentang "Imbalan Kerja". Dalam SAK EP Bab 28 tentang Imbalan Kerja tersebut, mewajibkan entitas untuk mengakui liabilitas atas seluruh imbalan yang menjadi hak karyawan sebagai akibat dari jasa yang diberikan pada periode berjalan dan periode lalu.

Hal-Hal Lain
Kami menarik perhatian pada Catatan Atas Laporan Keuangan nomor "2.f.i.", yang menjelaskan bahwa kebijakan metode perhitungan CKPN PT BPR Artha Moro berdasarkan Keputusan Direksi PT. BPR Artha Moro Nomor: 220/DIR/BPR-AMIX/2025 Tentang Penerapan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) tanggal 09 September 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.
Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan
Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan

Kantor : Jl. Tegalsari Raya No: 14, Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198
Telp/Fax: (0274) 2841679, Email: kap.iy.pst@gmail.com; kap.iy.ind@gmail.com; kap.iy.yud@gmail.com



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Indarto dan Yudhika
Managing Partner

Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI
NIBAP. WP.0906
Yogyakarta, 16 April 2026: MAS



Kantor : Jl. Tegalsari Raya No: 14, Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198
Telp/Fax: (0274) 2841679, Email: kap.iy.pst@gmail.com; kap.iy.ind@gmail.com; kap.iy.yud@gmail.com

2

D. SURAT PERNYATAAN DIREKSI



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA MORO

Jl. Veteran No. 7 Mageru, Sragen Tengah, Sragen
Telp. (0271) 892367, Fax. (0271) 895698
Email : bpr.arthamoro@gmail.com

Form D.00.00
Surat Pernyataan Direksi
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Moro
Posisi Laporan : 31 Desember 2025

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henry Yulian, SE
Jabatan : Direktur Utama
Alamat kantor : Jl. Veteran No. 7, Mageru, Sragen Tengah
Sragen, Jawa Tengah

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas kebenaran data dan/atau informasi dalam Laporan Keuangan Tahunan PT BPR Artha Moro per tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan keuangan PT BPR Artha Moro per tanggal 31 Desember 2025 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
3. Bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT BPR Artha Moro per tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan bank.
4. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT BPR Artha Moro untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah diterapkan dengan baik untuk menjamin integritas laporan keuangan dan tidak terdapat manipulasi atau kecurangan dan/atau salah saji material dalam laporan keuangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sragen, 28 April 2026

PT BPR Artha Moro



Henry Yulian, SE
Direktur Utama

Mitra Terpercaya Keuangan Anda

E. LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jalan Veteran No 7, Mageru, Sragen Tengah, Sragen, Jawa Tengah
Nomor Telepon	: 0271 892367
Penjelasan Umum	: BPR telah melaksanakan penerapan tata kelola secara cukup baik
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: 3 (Cukup Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: BPR telah melaksanakan penerapan tata kelola secara cukup baik. Beberapa kelemahan yang ada akan menjadi perhatian manajemen dan akan dilakukan perbaikan atau pemenuhan sesuai dengan prinsip tata kelola.

2. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>Nama : HENRY YULIAN, SE</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab: Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank, direksi juga selalu melaksanakan tata kelola dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: Penerapan tata kelola telah dilakukan secara cukup baik dan menerapkan manajemen resiko yang efektif dalam setiap operasional bisnis.</p> <p>Penjelasan Lebih Lanjut:</p>

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>Nama : SRI YATIN, SE</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab: Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasehat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</p>
2.	<p>Nama : WIDODO, SH.MM</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab: Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasehat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</p> <p>Rekomendasi Kepada Direksi: Meminta direksi untuk mengupayakan penurunan NPL, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, dan mencapai laba yang optimal.</p> <p>Penjelasan Lebih Lanjut: Komisaris melakukan pengawasan atas rasio NPL dan pencapaian laba bersih BPR.</p>

- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
BPR Artha Moro tidak memiliki Komite.

3. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

- a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	HENRY YULIAN, SE	0	0	0	0

- b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	SRI YATIN, SE	3.944.000.000	98,60	3.944.000.000	98,60
2.	WIDODO, SH.MM	0	0	0	0

4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

- a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HENRY YULIAN, SE	-	-	0

- b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SRI YATIN, SE	620124	PT BPRS Sukowati Sragen (Perseroda)	4,47
2.	WIDODO, SH.MM	-	-	0

5. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

- a. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	HENRY YULIAN, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

b. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SRI YATIN, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	WIDODO, SH.MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

6. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

a. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	HENRY YULIAN, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

b. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SRI YATIN, SE	Tidak ada	Tidak ada	Ibu Helen Yosita Gunawan - Anak Kandung
2.	WIDODO, SH.MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

7. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	156.000.000	2	132.000.000
2.	Tunjangan	0	0	0	0
3.	Tantiem	0	0	0	0
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi			156.000.000		132.000.000
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	0	0	0	0
2.	Transportasi	0	0	0	0
3.	Asuransi kesehatan	0	0	0	0
4.	Fasilitas lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunasi dan Fasilitas Lain			156.000.000		132.000.000

8. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.30 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.61 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.41 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.75 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.47 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut:	

9. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	26 Maret 2025	2	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pencapaian Laba Rugi sesuai Rencana Bisnis BPR. - Peningkatan penyaluran kredit dan penanganan kredit bermasalah. - Peningkatan kinerja karyawan. - Pengawasan penerapan APU PPT.
2.	30 Juni 2025	2	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Pemegang Saham Pengendali untuk menjual saham pada BPR Artha Moro. - Peningkatan kinerja karyawan. - Evaluasi penanganan kredit bermasalah. - Pemenuhan kekosongan Direktur YMFK.
3.	19 September 2025	2	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dan evaluasi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), termasuk evaluasi vendor <i>core banking system</i>. - Pemenuhan kekosongan Direktur YMFK. - Evaluasi pencapaian Rencana Bisnis BPR. - Evaluasi penanganan kredit bermasalah. - Pengawasan penerapan APU PPT.
4.	12 Desember 2025	2	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pencapaian Rencana Bisnis tahun 2025 dan pembahasan Rencana Bisnis tahun 2026. - Pemenuhan kekosongan Direktur YMFK. - Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025.
<p>Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun: Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun dan seluruhnya dihadiri lengkap oleh Anggota Dewan Komisaris.</p>			

10. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	SRI YATIN, SE	4	0	100
2.	WIDODO, SH.MM	4	0	100

11. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut: Nihil								

12. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut: Nihil		

13. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							

14. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK / NPWP	Jumlah (Rp)
1.						
2.						
3.						
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik						
Nihil						

Sragen, 28 April 2025

PT BPR Artha Moro


Mengetahui



Widodo, SH.MM
Komisaris



Direksi



Henry Yulian, SE
Direktur Utama